

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik ekonomi maupun sosial. Seperti yang terdapat dalam Todaro (2006:28), menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial (Dumairy, 1996: 65-66). Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

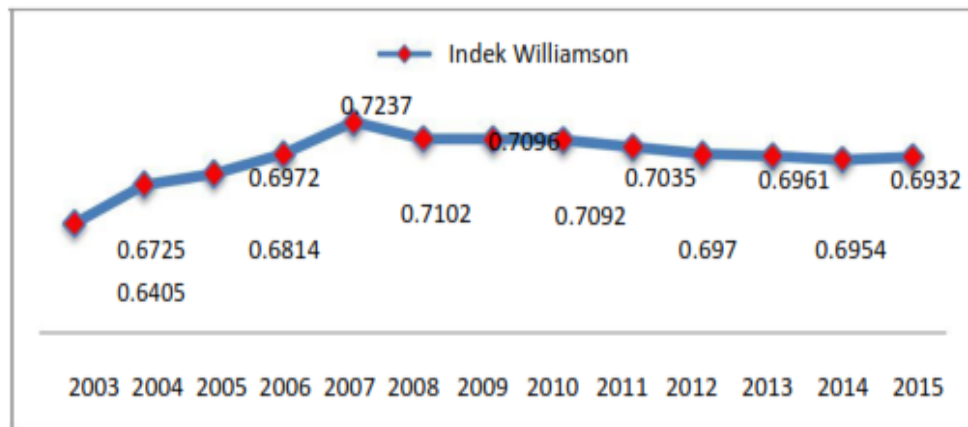
Kata kunci dari pembangunan adalah pembentukan modal, karena untuk mencapai target pembangunan yang tinggi pada suatu negara dibutuhkan nilai investasi yang besar. Sehingga strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi (Kuncoro, 2010:4). Selain itu, kebutuhan akan investasi yang besar dapat diperoleh juga melalui dorongan kondisi negara yang sudah lebih baik terutama sistem pelayanan serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Namun demikian tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, karena adanya keterbatasan baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lembaga institusi yang mendukung. Sebab pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensi yang berbeda (Perroux dikutip dalam Arsyad, 1999:147). Dalam intensi pertumbuhan yang berbeda, pelaksanaan pembangunan sering mengalami perdebatan antara mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan disatu pihak dengan efektivitas dan pemerataan dipihak lain (Dumairy, 1996:55-56). Dari hal tersebutlah, pelaksanaan pembangunan tidak jarang menciptakan adanya ketimpangan.

Adanya otonomi daerah sebagai sistem kerja pemerintah Indonesia, diharapkan kebijakan ini juga dapat memberikan kemudahan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (daerah di sini terutama kabupaten dan kota), pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan serta

peningkatan kesetaraan kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan. Selain itu, ada beberapa keuntungan kebijakan otonomi daerah menurut (Suparmoko, 2002:19), pertama adalah sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masing-masing masyarakat, kedua adalah pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri, ketiga adalah dengan adanya otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang akan dilakukan.

Walaupun demikian ketimpangan pembangunan antar daerah masih juga terjadi, seperti yang tertera dalam Gambar 1.



Sumber: BPS Jawa Tengah 2015

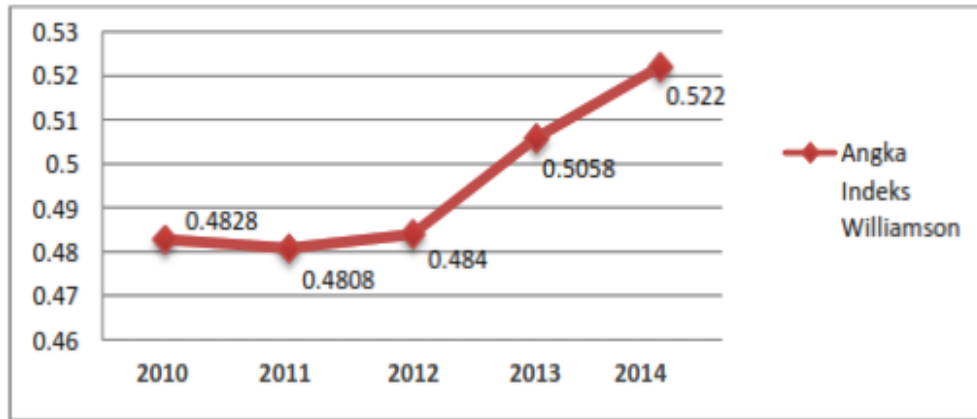
Gambar 1. Nilai Indeks Williamson antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2015.

Berdasarkan Gambar 1, terkait nilai indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2015, menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2003 terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2007 tingkat ketimpangan

mencapai nilai hingga 0,7237 yang termasuk kategori ketimpangan yang tinggi, meskipun mulai tahun 2008 tingkat ketimpangan mulai perlahan mengalami penurunan. Dari ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pada tahun 2003, pembangunan antar daerah justru mengalami peningkatan dalam ketimpangan pembangunan.

Disamping ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ketimpangan pembangunan juga terjadi di wilayah kabupaten itu sendiri. Seperti halnya ketimpangan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Ketimpangan telah mengakibatkan adanya pembagian wilayah antara Cilacap Bagian Barat dan Cilacap Bagian Timur. Timbulnya pembagian wilayah merupakan bentuk kecemburuan masyarakat dari daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian dalam pembangunan. Dan ketimpangan pembangunan yang terjadi telah mendorong masyarakat di wilayah Cilacap Barat untuk membentuk daerah otonomi tersendiri (Een Erliana, 2014).

Besarnya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Cilacap juga dapat ditunjukkan dengan Indeks Williamson pada Gambar 2. Di mana data yang digunakan dalam pengukuran adalah Produk Domestik Regional Bruto.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2015

Gambar 2. Perkembangan Tingkat Pembangunan Antarwilayah melalui Indeks Williamson di Kabupaten Cilacap Tahun 2010-2014.

Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan adanya tingkat perkembangan ketimpangan yang semakin meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Terlihat pula pada tahun 2014 angka indeks Williamson mencapai 0,522 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Cilacap dalam kategori level tinggi.

Di dalam Kabupaten Cilacap (2010:8), menyebutkan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan wilayah dengan corak sosiokultural yang dicirikan dengan luasnya daerah pedesaan dan kultur agraris dalam kehidupan masyarakatnya. Dan berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas 2013, Kabupaten Cilacap memiliki PDRB dan PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, besarnya PDRB mencapai 102.483 juta rupiah dengan pendapatan perkapita sebesar 58.383.477 rupiah. Namun PDRB tanpa migas yang diperoleh Kabupaten Cilacap lebih rendah yaitu hanya 21.917,10 miliar rupiah dengan pendapatan perkapita yang diperoleh sebesar 13.744.886 rupiah. Besarnya PDRB dan pendapatan perkapita berdasarkan PDRB ADHB dengan migas, menunjukkan bahwa perekonomian

di Kabupaten Cilacap tidak mencerminkan kondisi atau corak kehidupan masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan dalam Sugiyanto (2011:228), tingginya pendapatan perkapita di Kabupaten Cilacap ini lebih disebabkan oleh sumbangan perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana. Dan berdirinya perusahaan-perusahaan besar yang ada, memberikan pula andil yang besar bagi Kabupaten Cilacap, selain peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi tetapi juga mendorong Kabupaten Cilacap ke dalam kategori 19 kota-kota besar yang cepat tumbuh diwilayah Indonesia (Bappenas, 2006-2011).

Namun demikian pesatnya perekonomian di Kabupaten Cilacap disertai pula pelaksanaan pembangunan yang timpang. Melalui hasil studi oleh Budi Handayani (2005), bahwa selain kondisi geografis dari masing-masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang beragam, pelaksanaan pembangunan justru banyak dipusatkan di pusat kota. Dan pada akhirnya kebijakan pusat wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pelaksanaannya tidak efektif. Di mana pusat subwilayah pembangunan merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang.

Sedangkan adanya perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Cilacap peran perusahaan kurang berimbas bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya, terutama penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian oleh Ani Kurniati (2007), menyebutkan bahwa adanya industrialisasi khususnya di

Kota Cilacap telah mendorong penanaman investasi, namun juga menarik minat tenaga kerja dari daerah lain. Sekitar kurang lebih 70 persen tenaga kerja yang terserap oleh adanya industrialisasi berasal dari luar daerah. Migrasi tenaga kerja yang berasal dari daerah lain di Jawa Tengah mencapai 54.4 persen sedangkan 45.6 persen berasal dari luar Jawa Tengah.

Bentuk ketimpangan pembangunan lainnya juga terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Prapsetyo (2012), dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap dengan kondisi ancaman atau buruk. Walaupun mendapat perhatian pemerintah, namun tidak semua daerah mengalami peningkatan kualitas maupun kuantitas pembangunan infrastruktur yang sama.

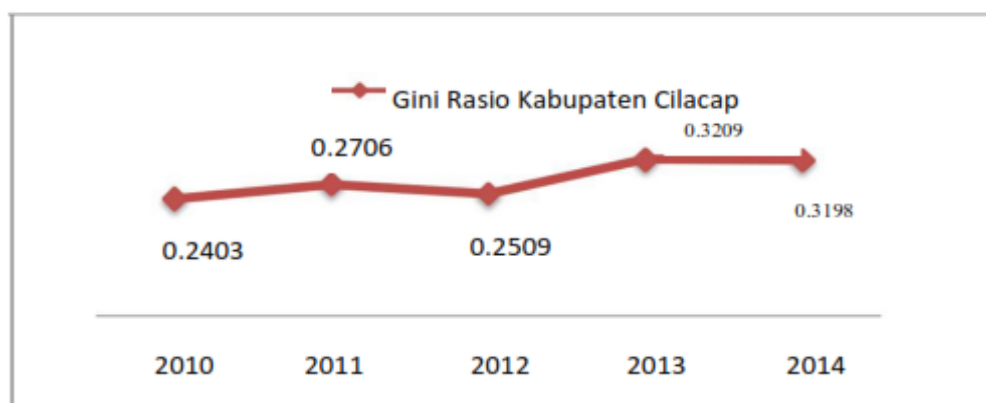
Adanya perbedaan potensi dan kondisi geografis sebagai penyebab dalam ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Cilacap, kondisi demografi juga terlihat mengalami ketimpangan. Seperti ketimpangan yang terjadi dalam kualitas tingkat pendidikan masyarakatnya. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya (Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap, 2013:30). Pendidikan juga merupakan investasi yang dibutuhkan sebagai modal manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Tabel 1. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014

Jenjang Pendidikan	Jumlah penduduk dengan kelulusan	Jumlah penduduk yang masih sekolah	Jumlah penduduk keseluruhan
Belum/Tidak Pernah Sekolah	-	-	139.371
Belum/Tidak Tamat SD/TK	336.416	15.582	351.998
SD Sederajat	415.792	204.603	620.395
SLTP Sederajat	174.669	90.269	264.938
SLTA Sederajat	126.041	52.114	178.155
Akademi/PT	39.354	5.689	45.043

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Cilacap masih terbilang rendah. Dilihat dari jumlah penduduk dengan lulusan SD lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk lulusan SLTP, SLTA dan PT. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Cilacap masih terbilang rendah tetapi persebaran atau tingkat distribusi pendapatannya sudah terlihat adanya pemerataan, seperti yang terlihat dari Gini Rasio untuk Kabupaten Cilacap tahun 2010-2014.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2015

Gambar 3. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Cilacap Tahun 2010-2014.

Berdasarkan Gambar 3, terkait perkembangan Gini Rasio Kabupaten Cilacap tahun 2010-2014, menunjukkan adanya peningkatan dalam

ketimpangan pendapatan masyarakat. Ketimpangan tertinggi diperoleh pada tahun 2013 sebesar 0,3209, meskipun peningkatan tersebut masih dikategorikan level rendah.

Lain halnya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Meski distribusi pendapatan masyarakat tidak terlalu timpang namun tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap terbilang masih tinggi.

Tabel 2. Data Keluarga Menurut Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Cilacap Tahun 2014

Data Keluarga	Jumlah keluarga	Persentase (%)
Keluarga Pra Sejahtera (Dikelompokkan sebagai “Sangat Miskin”)	134.970	26,94
Keluarga Sejahtera Tahap I Dikelompokkan sebagai “Miskin”)	119.789	23,91
Keluarga Sejahtera Tahap II	131.090	26,16
Keluarga Sejahtera Tahap III	93.787	18,72
Keluarga Sejahtera Tahap III Plus	21.408	4,27

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap 2015

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan masih tingginya tingkat keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap I, yang tergolong keluarga sangat miskin dan miskin yaitu sebesar 26,94 % dan 23,91 %. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hampir sebagian keluarga di Kabupaten Cilacap masih tergolong miskin.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, Kabupaten Cilacap memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik, namun disertai dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Oleh karena itu menarik untuk diketahui bagaimana kondisi sebenarnya pembangunan yang ada di tiap kecamatan. Maka penelitian ini berjudul “Analisis Ketimpangan Dalam

Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2006-2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan kondisi umum yang terjadi sebagai akibat adanya pembangunan, namun sampai sejauh mana ketimpangan pada akhirnya menimbulkan dampak negatif.
2. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Cilacap terbilang pesat, namun kebijakan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap tidak berjalan secara efektif.
3. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Cilacap masih terbilang rendah, dimana penduduk dengan lulusan SD masih lebih banyak dibandingkan penduduk lulusan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
4. Tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Cilacap masih didominasi oleh keluarga miskin, meskipun persebaran pendapatan masyarakat terbilang merata.
5. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan berdampak terhadap kesejahteraan.

C. Batasan Masalah

Masalah ketimpangan pembangunan berwujud dan berlangsung dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Sehingga dalam melakukan penelitian

dibutuhkan batasan agar tidak terlalu luas. Dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah dengan adanya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Cilacap dan beberapa literatur penelitian yang mendukung yang pernah dilakukan di Kabupaten Cilacap. Penelitian ketimpangan pembangunan ini terbatas menggunakan beberapa indikator pembangunan di bidang ekonomi (struktur pertumbuhan ekonomi) dan bidang sosial (pendidikan, kesejahteraan, dan pertumbuhan penduduk).

Data yang digunakan adalah data tahun 2006 sampai dengan tahun 2015, penelitian ini menggunakan data 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.

D. Rumusan Masalah

Ketidaksetaraan anugerah awal di Kabupaten Cilacap memang sudah menunjukkan adanya ketimpangan secara sektoral. Selanjutnya program pembangunanpun mengalami ketidakmerataan dan telah berakibat pada kesenjangan pembangunan di tiap kecamatan. Dimana, program-program pembangunan lebih dikerahkan dipusat kota kabupaten.

Terjadinya kesenjangan program pembangunan seperti halnya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, telah berdampak pada kemakmuran di tiap kecamatan. Dan pada akhirnya wilayah yang kurang mendapatkan perhatian pembangunan berkeinginan melakukan pemisahan diri atau pemekaran daerah.

Dari adanya permasalahan di atas, ketimpangan bukan hanya sebagai kondisi umum yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Namun

ketimpangan juga terbentuk karena direncana ataupun disengaja dan juga sebagai akibat dari suatu kondisi yang memang susah untuk dirubah. Untuk itu lah, mengapa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Cilacap penting untuk dianalisis. Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, penelitian ini fokus terhadap:

1. Bagaimana ketimpangan ekonomi tiap kecamatan kabupaten cilacap periode 2006-2015?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh jumlah keluarga miskin terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk migrasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui ketimpangan ekonomi tiap kecamatan di kabupaten cilacap periode 2006-2015.
2. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.

3. Mengetahui pengaruh jumlah keluarga miskin terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.
4. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk migrasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang mementingkan ketimpangan pembangunan antar wilayah disamping pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Tambahan referensi dalam penelitian lanjutan yang disesuaikan dengan bidangnya.
3. Tambahan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah.

G. Metode Penelitian

1. Alat dan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Cilacap. Penelitian data panel merupakan kombinasi data runtun waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Dengan persamaan dasar regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$NS_{it} = \beta_0 + \beta_1 J_{lit} + \beta_2 K_{pit} + \beta_3 P_{pm_{it}} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

NS_{it} = Nilai Standar Untuk Mengukur Deviasi PDRB suatu Wilayah Terhadap Rata-Ratanya

β_0 = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien Regresi variabel Independen

J_l = Jumlah Lulusan SMA & PT

K_p = Keluarga pra Sejahtera

P_{pm} = Pertumbuhan penduduk migrasi

ε = error

i = Unit *Cross section*

t = tahun ke t

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang meliputi data Jumlah Lulusan SMA dan PT, Keluarga Pra sejahtera, Pertumbuhan penduduk migrasi

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan ,sehingga di susunlah suatu sistematika penulisan berisi informasi mengenai materi dan hal yang di bahas dalam tiap-tiap bab adapun penelitian ini di bagi ,menjadi 5 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggunakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan metode analisis data serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan tinjauan terhadap penelitian dan dilakukan terdahulu dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisis jenis data dan sumber pengumpulan data,definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan di jelaskan mengenai analisis deskriptif dari obyek penelitian serta analisis data pengujian hipotesisi dan pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan pembahasan keseluruhan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN